

# Analisis Etika Komunikasi Pejabat Publik Berdasarkan Model Komunikasi Harold D. Lasswell

Ayu Nurchasanah<sup>1\*</sup>, Arif Zainudin<sup>2</sup>, Akhmad Habibullah<sup>3</sup>  
<sup>1-3</sup>Universitas Pancasila Tegal, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : [ayunurchasanah0@gmail.com](mailto:ayunurchasanah0@gmail.com)

**ARMADA**  
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 05 Mei, 2026

Page: 832-843

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i5.2204>

#### Article History:

Received: April 27, 2026

Revised: Mei 09, 2026

Accepted: Mei 20, 2026

**Abstract** : In the digital era, the communication ethics of public officials have become highly sensitive issues, as every statement can rapidly spread and influence public opinion. Cases such as the slip of the tongue by Adies Kadir regarding parliamentary allowance increases, the controversial remarks of Ahmad Sahroni, the dancing actions of Eko Patrio and Uya Kuya, as well as the deepfake video involving Sri Mulyani, demonstrate the growing ethical problems of communication within the digital public sphere. This study aims to analyse the communication ethics of public officials based on Harold Dwight Lasswell's communication theory. The research employed a qualitative approach using data from online news reports and YouTube content from the Honourary Council Court between August and September 2025. Data were analysed through thematic analysis supported by NVivo 12 Plus software. The findings reveal problematic communication patterns among public officials, characterised by limited empathy and weak social responsibility, potentially reducing public trust and increasing disinformation. These findings also indicate inconsistencies with the civil servant code of ethics under Law No. 5 of 2014, Article 5 paragraph (2) point i, regarding the obligation to provide accurate and non-misleading information.

**Keywords** : Ethics Communication, Public Officials, Harold D. Laswell's Theory, Tematic Analysis

**Abstrak** : Di era digital, etika komunikasi pejabat publik menjadi isu yang sangat sensitif karena setiap pernyataan dapat dengan cepat tersebar dan memengaruhi opini masyarakat. Kasus slip of the tongue Adies Kadir terkait kenaikan tunjangan DPR, diksi kontroversial Ahmad Sahroni, aksi joget Eko Patrio dan Uya Kuya, hingga video deepfake yang menyeret nama Sri Mulyani menunjukkan meningkatnya problem etika komunikasi di ruang publik digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis etika komunikasi pejabat publik berdasarkan teori komunikasi Harold Dwight Lasswell. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data berupa pemberitaan media online dan konten YouTube Mahkamah Dewan Kehormatan selama Agustus–September 2025. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik berbantuan NVivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan pola komunikasi pejabat publik yang problematik, minim empati, dan rendah tanggung jawab sosial sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta memicu disinformasi. Temuan ini juga menunjukkan

ketidaksesuaian dengan kode etik ASN dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (2) poin i mengenai kewajiban penyampaian informasi secara benar dan tidak menyesatkan.

**Kata Kunci** : Etika Komunikasi, Pejabat Publik, Teori Harold D.Laswell, Analisis Tematik

## PENDAHULUAN

Etika sebagai landasan batasan hubungan antar manusia mana yang benar atau salah dari suatu tindakan perilaku yang dilakukan (Betresia *et al.*, 2021). Etika mempelajari kebiasaan tentang apa yang baik dan buruk dalam hal kewajiban dan hak. Menurut James J. Spillane dalam Betresia *et al.*, (2021) dalam pengambilan suatu keputusan manusia perlu memperhatikan tingkah laku dalam bertindak. Dikutip dari buku Komunikasi Politik Pemerintahan etika menurut Aristoteles dalam bukunya *Etika Nikomacheia*, mengartikan menjadi dua konsep. Pertama, *terminus technicus* bahwa etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan tindakan salah manusia. Kedua, *Manner dan Custom* bahwa etika kebiasaan yang telah melekat di diri manusia bentuk baik dan buruk tingkah laku atau perbuatan manusia (Syauket *et al.*, 2024). Erina Naingolan & Kartini, (2024) menyampaikan dalam Islam berbicaralah yang baik adalah suatu bukti mengendalikan suatu perkataan, karena suatu perkataan dapat mendatangkan hal baik (pahala) dan kabar gembira. Komunikasi yang baik mendatangkan kegembiraan dari apa yang disampaikan dan menciptakan hubungan dan kerjasama yang baik.

Kemajuan era digital saat ini mengaburkan nilai-nilai etika komunikasi. Banyak fenomena menurunnya etika komunikasi dimana seharusnya kesadaran beretika tetap perlu ditanamkan. Berbicara tidak boleh melontarkan ucapan kotor serta berhati-hati dalam berbicara dan setiap perkataan kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat (Sari, 2020). Fenomena menurunnya etika komunikasi juga dirasakan dikalangan para elite politik yang menjadi perhatian serius dipertengahan tahun ini. Seorang pejabat dengan pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi contoh ternyata melakukan tindakan yang melanggar kode etik pejabat (Fauzia Qonita, 2019). Beberapa studi kasus ditampilkan, pemerintah dipandang sebagai sumber kolektif yang berperan dalam komunikator politik perwakilan suatu lembaga ataupun organisasi (Fahrudin, 2021). Dikutip dari Teras Widy Rahayu, (2020) ada hambatan yang perlu diperhatikan sebagai komunikator: hambatan psikologis, hambatan sosio-kultural, hambatan mekanis, dan hambatan interaksi verbal.

Sekar Arum & Suryanto, (2025) menyampaikan komunikasi politik dimaknai suatu bahasa yang tidak pernah netral dengan tiga fungsi instrument penting yakni pembentukan relasi kuasa, meneguhkan ideologi, sekaligus mengonstruksi legitimasi sosial. Sebagai pejabat publik, tutur bahasa yang kontroversial seringkali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah pernyataan kontroversial dari kalangan pejabat menteri hingga legislatif. Ditengah aksi demonstrasi nasional yang terjadi sebagai bentuk komunikasi tuntutan masyarakat terhadap ketidakadilan di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesulitan. Puncak tuntutan yang dilakukan bertujuan agar masyarakat mendapat perhatian dari pemerintah terhadap kebijakan yang dirasakan tidak adil. Dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya prinsip etika yakni tanggung jawab, dedikasi, loyal, kepekaan, kesetaraan dan keadilan (Rukmini Widiaswari, 2022). Salah satu tuntutan yang diserukan “Reformasi DPR besar- besaran” pada demo nasional 25 Agustus 2025 kemarin (Dianira, 2025).

Di tengah gelombang protes demonstran sikap arogansi dan budaya *flexing* anggota legislatif juga mencuri perhatian publik. Aksi viral joget-joget ditengah isu kenaikan tunjangan anggota dewan pada Sidang Tahunan MPR RI dimana para anggota DPR asyik meluweskan badan dengan iringan lagu “Sajojo” dan “Gemu Fa Mi Re” dan video Eko Patrio parodi sound horeg yang defensif terhadap kritik. Masyarakat menanggapi aksi ini sebagai bentuk ketidakpekaan kondisi ekonomi saat ini. Dilansir dari Kabarsleman.com adanya video viral wakil ketua DPR Adies Kadir pada 19 Agustus 2025 yang merinci bahwa anggota DPR mendapat tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan. Tunjangan fantastis lain adanya tunjangan beras hingga 12 juta rupiah dan tunjangan bensin 7 juta rupiah per bulan. Dari pernyataan ini membuat persepsi publik terkait fasilitas mewah

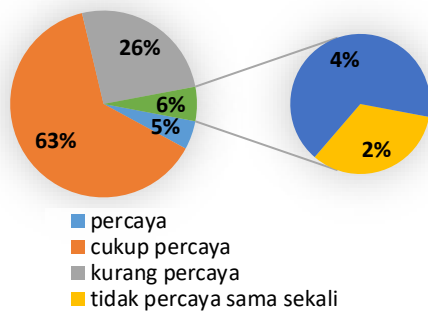
bagi para elite ditengah menurunnya harga beli masyarakat. Artis sekaligus anggota DPR, Nafa Urbach memberikan pernyataan dukungan terkait tunjangan rumah Rp 50 juta dan mengeluh atas kondisi kemacetan daerah Bintaro. Bukannya meredakan situasi ditengah perjuangan masyarakat dalam pemenuhan hidup, justru dianggap sensitif dan mengundang kritik ditengah kesulitan ekonomi (BOIM, 2025). Saputra, (2025) menegaskan pernyataan diatas mencerminkan cara pandang kenyamanan pribadi dan status elite sebagai prioritas dan tidak menganggap kritik publik.

Dalam Sekar Arum & Suryanto, (2025) sikap tidak etis semakin memperburuk pemicu dengan munculnya tanggapan dari seorang Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Partai NasDem, Ahmad Sahroni yang menanggapi seruan aksi pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia”. Peristiwa ini memunculkan perdebatan di media dan berkembang menjadi tragedi kerusuhan penjarahan dirumah pribadi Sahroni. Nurul Fadillah, (2023) menegaskan katakana yang baik atau diam menurut firman Allah dalam (QS. Al Isra’:36) dan (An-Nisa:148) bahwa setiap perbuatan baik lisan ataupun tindakan kelak akan dipertanggung jawabkan. Setidaknya dalam berkomunikasi tahu kapan harus berbicara atau lebih baik diam sehingga tidak keluar darinya ucapan buruk. Diam disini bermaksud menghindari kondisi tertentu seperti: menghindari konfrontasi, menghindari kalimat yang tidak efektif, menyusun suatu strategi, dan diam membangun komunikasi nonverbal.

Pernyataan kontroversial Mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut soal gaji guru dan dosen sebuah tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Ungkapan ini melukai perasaan para pendidik secara tidak langsung mereka seolah beban negara, bukan pahlawan tanda jasa sebagai pemaknaan seorang pendidik. Dari pernyataan tersebut dapat menimbulkan suatu ujaran kebencian berupa bentuk provokasi, omelan atau bahkan ejekan dari faktor ras, jenis kelamin, warna kulit, agama dan faktor lain (Aryanto Gabur, 2023). Selain pernyataan kontroversi, gaya hidup dari kalangan pejabat negara juga menjadi topik menarik. Elyasa, (2023) menegaskan bahwa gaya hidup *flexing* para pejabat menciptakan jarak sosial antara penguasa dan rakyat, memunculkan persepsi pejabat lebih mementingkan citra diri daripada kesejahteraan. Perilaku tersebut menyalahi prinsip dasar ASN yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik dan hidup sederhana sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menpan-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

Dalam kondisi masyarakat yang tengah berjuang menghadapi tekanan ekonomi, tindakan semacam ini menimbulkan luka sosial dan memperkuat stigma bahwa pemerintah kehilangan empati moral. Etika penyelenggara negara adalah kesatuan dari moral etika dan landasan filosofis bagi Indonesia yakni Pancasila (Warsyim, 2023). Dalam Salomon A.M & Babys, (2020) menegaskan Pancasila sebagai perwujudan komunikasi pada konteks interaksi dengan tiga bentuk: kewajiban berkomunikasi dengan tuhan, kewajiban berkomunikasi dengan diri sendiri dan manusia lain serta kewajiban berkomunikasi dengan lingkungan. Menurut Jean-Jacques Rousseau dalam Solosumantro, (2025) ada empat pokok penting etika moral dalam berkehidupan, pertama manusia secara alami baik, kedua moralitas sebagai ekspresi perasaan, ketiga kebebasan dan autensitas dan keempat kontrak sosial dan moralitas publik.

Sejumlah besar respons publik terhadap pernyataan kontroversial ataupun tindakan *flexing* tersebut menunjukkan hubungan erat antara wacana politik dan praktik sosial. Aksi protes yang meluas terjadi karena masyarakat melihat sebagai tanda arogansi wakil rakyat. Narasi kolektif dan tindakan hedonisme menunjukkan bagaimana bahasa elit dapat membantu gerakan sosial bersatu. Ini sejalan dengan aksi demo nasional 17+8 tuntutan bulan agustus kemarin sebagai simbol kekecewaan yang mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap tindakan DPR yang gagal dari fungsi representasi, transparansi, dan akuntabilitas (Azzahra Salsabila et al., 2025).



**Gambar 1:** Survei Indikator Politik Indonesia diolah excel



**Gambar 2:** GoodStats

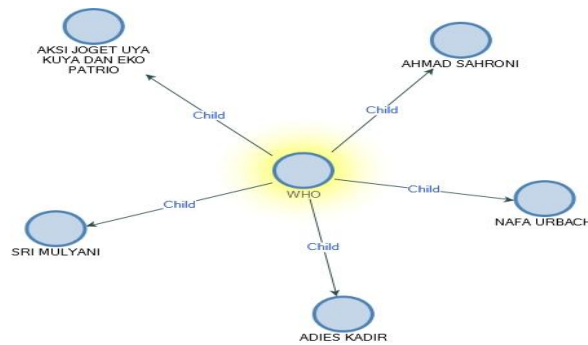
Pada dasarnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR saat ini telah mengalami penurunan. Dari data di atas masyarakat saat ini lebih banyak pada kategori cukup percaya. Disisi lain ada 26% kurang percaya (Rizki, 2025). Menurut data GoodStats tingkat kepercayaan warga cenderung fluktuatif, tingkat kepercayaan tertinggi tercatat 76% pada tahun 2022 dan 2023, tetapi sedikit menurun pada tahun 2025 menjadi 75% (Yonatan, 2025). Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dapat dilihat dari akibat komunikasi para pejabat yang melontarkan pernyataan provokasi. Seperti teori Harold Dwight Laswell yang mengungkapkan model komunikasi sebagai *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect*. Artikel ini menguraikan bagaimana model komunikasi berdasarkan teori Harold Dwight Laswell?.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong dalam Haki et al., (2024) penelitian kualitatif adalah memahami subjek berkaitan dengan fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara menyeluruh dalam bentuk deskripsi dengan kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif memahami fenomena etika komunikasi pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Sumber data mengutip pendapat para ahli dari media massa berita online dan media youtube Mahkamah Dewan Kehormatan mengenai pelanggaran etika pejabat yang terlibat kurun waktu bulan Agustus – September 2025. *Literature review* yang digunakan meliputi artikel ilmiah, buku, pendapat para ahli dan teori komunikasi Harold Dwight Laswell. Data dikumpulkan dengan *NCapture* melalui Nvivo 12 plus dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Analisis tematik memungkinkan peneliti menemukan pola, kategori, dan tema utama dari sumber data (Nurislaminingsih et al., 2021).

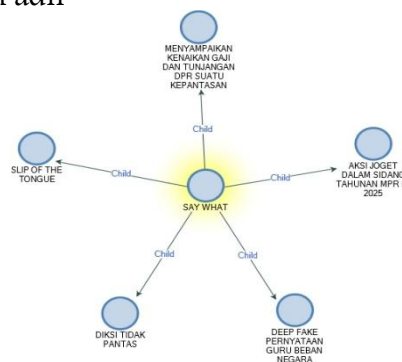
## HASIL DAN PEMBAHASAN

Harold Dwight Laswell sebagaimana di kutip Mito et al., (2020) seorang ilmuwan dalam bidang politik dan komunikasi dari Amerika, dikenal dengan model komunikasinya yang linier dan fungsi komunikasi massa. Penelitian berfokus pada proses komunikasi terkait etika pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan dengan menggunakan teori Model Laswell yang menguraikan beberapa elemen dan alur komunikasi seperti *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect*. Dalam analisis tematik dengan *Explore Diagram* menunjukkan pola tema yang tidak independent adanya keterhubungan tema utama dengan setiap sub tema.



**Gambar 3.** Explore Diagram *WHO*

Tema *WHO* menunjukkan komunikator yang terlibat bukan dari kalangan pejabat saja dalam arti formal, tetapi figur publik dan selebriti saat ini telah beririsan dalam wacana politik (*celebrity politics*). Mereka yang sebagai leader membuat suatu pernyataan, gestur, maupun konten yang berkaitan dengan kebijakan publik berpotensi menguatkan konsep *celebrity politics*. Wheeler, (2013) menjelaskan selebritas yang masuk dalam lingkup politik dengan membawa modal popularitas sekaligus memperjelas batasan antara komunikasi kebijakan dan hiburan. Dalam konteks aksi joget yang berada dalam forum kenegaraan, masyarakat menilai sebagai representasi sensibilitas elite bukan hanya semata hiburan. Dengan demikian, setiap pejabat atau figur yang mempunyai kewenangan dalam ruang publik dituntut memegang standar etika komunikasi dengan norma, tanggung jawab dan adil



**Gambar 4.** Explore Diagram *SAY WHAT*

Kedua, tema utama *Say What* muncul keterhubungan dengan beberapa indikator sub tema yang menggambarkan bentuk problem etika. Dalam konteks tanggapan dari Nafa Urbach terkait tunjangan rumah Rp 50 juta dan mengeluh atas kondisi kemacetan daerah Bintaro sebagai suatu kepantasan menggambarkan adanya ketidaksesuaian dengan situasi publik yang mengalami krisis ekonomi dan rendahnya empati. Isu kenaikan gaji dan tunjangan ini bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi membentuk krisis sensitivitas sosial dan empati moral (Ainur & Uin, 2025). Menyebarnya video Aksi joget dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 dimana anggota DPR meluweskan badan terlihat suatu ketidakpantasan dalam ruangan formal dengan acaranya yang membahas RAPBN berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Aksi joget tersebut berhubungan dengan politik era sekarang yang di kemas dengan gaya politik berbeda dengan acara hiburan seperti perayaan HUT Kemerdekaan ke 79 adanya iringan lagu “Ojo Dibandingke” yang dibawakan Farel Prayoga. Masa kampanye pemilu presiden 2024 personal branding Prabowo Subianto yang dikemas dengan “politik gemoy” dan iringan sound “Oke Gas” (Medista & Marianata, 2024)

*Deepfake* merupakan hasil manipulatif dari AI yang dioperasikan oleh manusia, kemampuannya dapat menggabungkan, membuat, memodifikasi gambar/video serta audio dengan hasil yang nyata namun rekayasa dan merusak prinsip kejujuran dan integritas pesan. *Deepfake* ini tergolong dalam disinformasi, yakni informasi yang secara sengaja diproduksi dan

disebarkan untuk hal menyesatkan, memanipulasi hingga menyimpang dari fakta (Sarjito, 2021). Beredarnya potongan video mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan “guru itu beban negara” sebenarnya hasil modifikasi gambar dari *deepfake*. Video yang tersebar memicu rasa ketidakadilan di kalangan guru dan memiliki efek terhadap otoritas dan legitimasi profesi tersebut. Regulasi terkait AI tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut pasal 1 angka 8 UU 11/2008 disebut “agen elektronik” didefinisikan AI belum cukup jelas untuk hukum AI sendiri (Tarigan, 2025).

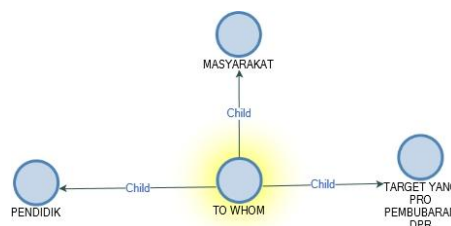
Disisi lain munculnya *slip of the tongue* dari Adies Kadir yang meralat kenaikan tunjangan dan diksi tidak pantas dari Ahmad Sahroni terkait tanggapannya di media “orang tolol sedunia” pada pendukung pembubaran DPR. Dalam problem etika komunikasi perlunya yang bersangkutan mengakui, menyadari dan segera meralat pernyataan tersebut secara terbuka. Seorang pejabat terikat dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 4 poin 1 yang mewajibkan ASN menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama. Kemudian peraturan mengenai kode etik ASN pada Pasal 5 ayat 2 poin i memerintahkan agar pejabat publik memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Problem etika ini menekankan pentingnya kesesuaian pesan dengan norma, nilai, dan harapan publik bukan hanya suatu kebenaran dan perlu kepastian hukum khusus teknologi AI.



Gambar 5. Explore Diagram *IN WHICH CHANNEL*

Ketiga, tema *In Which Channel* sebagai media penyebaran yakni TikTok dan Instagram. Berdasarkan data dari Katadata Insight Center Gen Z mengakses Instagram sebanyak 68,2% dan TikTok 39,20%. Pada masa pemilu 2024 dimana kedua platform mendukung strategi komunikasi dalam penyebaran kampanye sehingga terjadinya interaksi penyampaian politik dan membentuk persepsi pada pemilih muda. (Herdinta et al., 2025). Disisi lain, TikTok menjadi platform penyebaran video aksi joget anggota dpr dengan tempelan narasi kenaikan gaji dan tunjangan, video *deepfake* pernyataan “guru beban negara” dan di dukung algoritma yang signifikan dalam mempercepat penyebaran konten yang bersifat sensasional dan konspiratif. Ketika masyarakat selalu menerima disinformasi yang menyerang lembaga publik, maka efeknya kepercayaan terhadap institusi akan hilang meskipun informasi palsu dianggap suatu fakta. Selaras dengan Vosoughi et al., (2018) bahwa berita palsu yang sifatnya provokatif dan emosional penyebarannya lebih luas memunculkan *epistemic crisis* dimana batas antara fakta dan opini menjadi kabur. Dalam Suriadi, (2025) informasi palsu 70% mudah tersebar dibanding berita faktual.

Instagram dimanfaatkan Nafa Urbach dalam live streaming untuk menyampaikan pendapatnya terkait suatu kepantasan DPR mendapat kenaikan gaji dan tunjangan serta mengeluhkan macet daerah Bintaro. Situasi ini menggambarkan tidak memahami tekanan ekonomi dan sosial masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi. Instagram juga dimanfaatkan sebagai jalur klarifikasi Nafa Urbach dan pejabat lain (Uya Kuya, Eko Patrio dan Sri Mulyani).

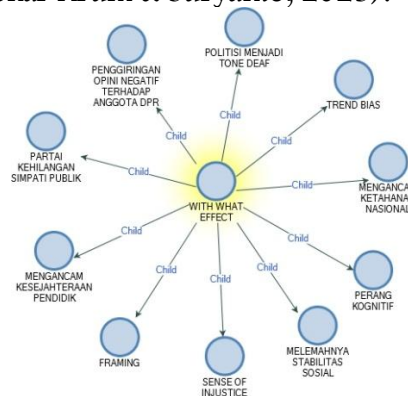


Gambar 6. Explore Diagram *TO WHOM*

Keempat, tema *To Whom* menggambarkan komunikasi (penerima pesan): Masyarakat sebagai konsumen media sosial rentan menerima pesan dalam bentuk sepotong video singkat tanpa konteks yang jelas, sehingga mudah dipengaruhi *framing* dan *trend bias*. Masyarakat tanpa literasi digital lebih rentan memaknai suatu konten yang menyimpang dianggap sebagai kebenaran. Indeks literasi digital menurut IMDI di tahun 2025 berada di skor 49,28 turun dari tahun sebelumnya menunjukkan kemampuan berpikir kritis digital belum seimbang dengan peningkatan dalam mengakses informasi.

Bagi pendidik, munculnya *deepfake* yang berisi Sri Mulyani menyampaikan guru sebagai “beban negara” memicu perdebatan dan melukai identitas profesi. Realitanya, berdampak buruk beliau diancam dan masyarakat marah hingga menyebabkan rumah pribadi dijarah 2 kali oleh kelompok tidak dikenal. Penyebaran DFK ini sangat berdampak buruk di aspek sosial bagi publik figure yang menjabat dan rentan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat akan sulit untuk menerima informasi yang berkaitan dengan pemerintah. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hoaks ditahun 2024 sebanyak 1.923 di Indonesia. Dengan jenis yang berbeda, jenis hoaks penipuan berada paling tinggi sebanyak 890 kasus, bidang politik dan pemerintahan 451 kasus, bidang Kesehatan 163 kasus dan kebencanaan 145 kasus (Iswenda, 2025). Teknologi yang semakin maju, pembuatan konten dengan alat yang menghasilkan *deepfake* menjadi tantangan baru dan dapat mengancam nama baik individu, kelompok dan institusi.

Sementara itu, pemilihan diksi tidak pantas dari Ahmad Sahroni bukan hanya sekedar spontanitas, melainkan menggambarkan relasi kuasa antara elit politik dan masyarakat. Menurut Fairclough, (2020) dalam pandangan analisis wacana kritis setiap perkataan mempresentasikan posisi ideologi tertentu serta berfungsi sebagai struktur sosial yang lebih luas di dalamnya. Maka dari itu, ujaran tersebut dipahami sebagai upaya mempertahankan otoritas lembaga legislatif menghadapi krisis legitimasi. Dalam teori *socio-cognitive* Van Dijk, (2014) pilihan kata “tolol” secara langsung merendahkan lawan bicara, yakni masyarakat yang pro pembubaran DPR. Dalam wacana politik Sahroni menduduki dirinya dan lembaga DPR pada posisi “rasional” dan “beradab” sementara lawan bicaranya diposisi “irasional” dan “tidak beradab”. Semacam ini berfungsi untuk menggelengkan dominasi elit melalui internalisasi makna yang merugikan kelompok. Dalam arus digital ucapan ini dikemas oleh *framing* menonjolkan aspek tertentu untuk membentuk perspektif publik. Akibatnya, pernyataan Sahroni tidak dipisahkan dari citra DPR secara lembaga, bukannya memperkuat posisi DPR tetapi teks politik menjadi pisau bermata dua memicu semakin melemahkan legitimasi lembaga (Sekar Arum & Suryanto, 2025).



**Gambar 7.** Explore Diagram *WITH WHAT EFFECT*

Kelima, Tema utama *With What Effect* menggambarkan dampak yang muncul dari problematik etika komunikasi. Politisi Menjadi Tone deaf merujuk pada politikus yang mengabaikan konteks sosial atau tindakan pernyataan yang menyinggung dan tidak relevan dengan penderitaan masyarakat. Menurut J. Higley, (2010) dalam Saputra, (2025) pernyataan tersebut sebuah gejala patologi dari sebuah privilege dari kekuasaan sehingga hilangnya rasa berempati dan kepekaan. Trend bias yakni sebuah kebenaran yang diulang belum tentu benar

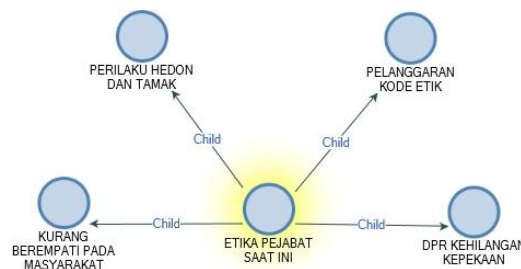
menurut data, riset tetapi suatu konten ataupun sudut pandang yang banyak di komentari, di like, di share ramai – ramai dianggap benar. Hal ini berhubungan adanya algoritma, menurut Jawad *et al.*, (2024) Algoritma menyajikan konten yang kita sukai dan takuti dengan mengonfirmasi keyakinan (*confirmation bias*), memancing emosi negatif (*negativity bias*) atau memperkuat identitas kelompok (*in-group bias*). Sehingga munculnya perang kognitif, dimana masyarakat terbentuk kelompok pro dan kontra dalam merespon suatu konten dengan emosi dari disinformasi, fitnah dan kebencian sebagai sumber utamanya.

Menurut Jayakumar *et al.*, (2021) yang dikutip dari Sarjito, (2021) bahwa ini mengancam ketahanan nasional dalam teori ketahanan sosial-politik yakni suatu negara berkaitan erat pada stabilitas informasi yang diterima oleh masyarakat. Adanya disinformasi di media sosial dapat melemahkan ketahanan dengan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan. Di era digital saat ini, teori kepercayaan publik berkembang konsep *institutional performance theory*, kinerja suatu lembaga sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (Suriadi, 2025). Ucapan elit yang sembrono, kebijakan yang tidak berpihak, hingga penanganan kritik yang defensif membuat publik semakin jauh dari para wakilnya berdampak serius melemahkan stabilitas sosial, ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik, tingkat apatisme politik meningkat, dan meningkatnya golput. Solusinya dibentuk komunikasi politik yang berorientasi pada empati, keterbukaan, dan kerja nyata. Dengan kurangnya literasi digital, masyarakat mudah tertipu dengan pembentukan opini publik melalui konten yang provokatif dan dikemas *framing* oleh *buzzer* atau akun anonim dapat merusak citra tokoh dan lembaga sehingga setiap tindakan DPR terbaca secara sinis dan menciptakan citra DPR kehilangan kepekaan yang tidak bermoral, hedonisme, dan tidak peka terhadap kondisi masyarakat.

Di era digital ini kemampuan berpikir kritis dan memahami isi pesan media merupakan kunci utama dalam membentuk informasi yang sehat (Suriadi, 2025). Dari ketimpangan ekonomi ataupun ketidakpercayaan terhadap elite memunculkan perasaan tidak adil atau *Sense Of Injustice*. Peristiwa ini berkembang menjadi tragedi kerusuhan penjarahan dirumah pribadi para pejabat (Ahmad Sahroni, Sri Mulyani, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Uya Kuya). Dampak lain Partai Kehilangan Simpati Publik dipersepsikan adanya ketidakpekaan dan hilangnya empati wakil rakyat terhadap situasi krisis ekonomi masyarakat. Peristiwa ini menggambarkan etika pejabat saat ini di media sosial yang membentuk citra negatif bukan hanya merujuk individu pelaku tetapi menyeret partai yang menaungi. Dalam konsep Teori Kepercayaan Publik (*Public Trust Theory*) kepercayaan masyarakat merujuk pada lembaga publik yang bertindak secara kompeten, adil dan sesuai kepentingan umum.

Hasil *deepfake* pernyataan “guru beban negara” memicu ancaman kesejahteraan pada profesi pendidik. Secara garis besar, Sri Mulyani berpidato terkait RAPBN dalam pidatonya menyampaikan 20% dari anggaran APBN dialokasikan untuk pendidikan. Kemudian, menyinggung tentang demonstrasi guru dan dosen terkait tunjangan kinerja dan dalam pidatonya Sri Mulyani bicara tentang gaji guru yang menjadi salah satu tantangan keuangan negara (Kirana, 2025). Dalam ranah pendidikan, ucapan Sri Mulyani menyiratkan bahwa kesejahteraan guru dan dosen belum menjadi prioritas pemerintah.

### Etika Pejabat Saat Ini

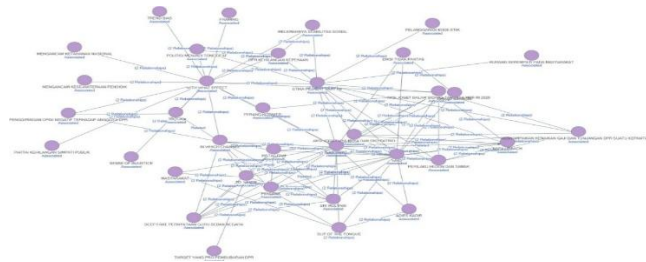


Gambar 8. Explore Diagram Nvivo 12 Plus

Dari uraian Teori Harold Dwight Laswell sebelumnya memunculkan pola etika pejabat saat ini yang menggambarkan citra negatif seperti: kurang berempati pada masyarakat, perilaku hedon dan tamak, pelanggaran kode etik, dpr kehilangan kepekaan. Kurang berempati pada masyarakat menonjolkan pembelaan diri, pencitraan daripada pengakuan tulus atas penderitaan publik. Hal ini bertentangan pada prinsip komunikasi publik yang saling menghargai, peduli dan bertanggung jawab sosial. Lunturnya empati menyebabkan publik memaknai suatu komunikasi dari pejabat sebagai strategi mempertahankan kekuasaan. Kedua, Perilaku hedon dan tamak mencerminkan sebagian pejabat menggunakan jabatan bukan semata amanah publik, melainkan menikmati sarana yang diberikan. Ketiga, Pelanggaran kode etik menandai dalam realita di lapangan adanya kesenjangan antara peraturan kode etik atas pelanggaran etik.

Pelanggaran etik ini bukan pada praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) tetapi pada penggunaan diksi tidak pantas, penyampaian informasi seenaknya, dan menanggapi kritikan publik dengan sikap kurang pantas. Selaras dengan putusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap 3 anggota DPR yang di non aktifkan, Ahmad Sahroni selama 6 bulan, Nafa Urbach selama 3 bulan dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) selama 4 bulan (Fajri, 2025). Keempat, DPR kehilangan kepekaan menjelaskan persepsi bahwa lembaga legislatif yang seharusnya sebagai representasi rakyat, adanya jarak terhadap masyarakat. Makna tone deaf dalam komunikasi politik merupakan tindakan elite yang gagal membaca suasana lapangan ketika berbicara atau bertindak didepan media.

### Analisis Relasi Antar Tema



**Gambar 9.** *Network Sociogram Nvivo 12 Plus*

Analisis terhadap visualisasi network sociogram menunjukkan adanya relasi node sentral adalah *Say What* menghubungkan komunikator (*Who*) terkait beberapa kasus yang terjadi dilapangan adanya Aksi Joget Uya Kuya dalam Sidang Tahunan MPR, Ahmad Sahroni terkait diksi tidak pantas dan video *deepfake* terkait pernyataan guru beban negara yang seolah-olah merupakan Sri Mulyani untuk pendidik (*To Whom*). Realitanya, dalam Instagram (*In Which Channel*) Sri Mulyani mengklarifikasi video tersebut merupakan hasil teknologi AI bentuk *deepfake* secara sengaja diproduksi oleh akun anonim. Kasus yang terjadi ini menggambarkan dampak (*With What Effect*) dan salah satu Etika Pejabat Saat Ini yakni DPR Kehilangan Kepekaan menunjukkan adanya penurunan standar etika pejabat yang dipersepsikan berwujud pada sikap wakil rakyat yang tidak peka terhadap situasi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis terhadap pernyataan pejabat publik menunjukkan bahwa etika komunikasi yang baik ditandai oleh beberapa prinsip etika yakni tanggung jawab, dedikasi, loyal, kepekaan, kesetaraan dan keadilan. Di sisi lain, ditemukan pola-pola komunikasi yang problematik, seperti penggunaan diksi yang tidak pantas, aksi kurang etis, pernyataan pembelaan isu kenaikan gaji yang tidak relevan dengan krisis ekonomi. Pola-pola tersebut berdampak pada erosi kepercayaan publik terhadap lembaga, bahkan membuka ruang bagi akun anonim menyebarkan informasi keliru untuk dipersepsikan sebagai fakta di ruang publik. Hasil ini selaras dengan pandangan bahwa berita atau pernyataan yang provokatif dan emosional cenderung lebih cepat dan lebih luas penyebarannya. Secara keseluruhan, hasil analisis mengindikasikan bahwa kualitas etika komunikasi pejabat publik berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan publik dan kerentanan masyarakat terhadap disinformasi. Pejabat publik sebagai komunikator perlu kehati-hatian dan

mengimplementasikan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menanggapi pernyataan di ruang publik secara transparan tanpa memperkeruh suasana.

Secara substantif, studi ini memberikan pemetaan yang lebih rinci mengenai bentuk-bentuk praktik komunikasi pejabat publik yang dapat dikategorikan melanggar kode etik atau tidak karena maraknya disinformasi ataupun *framing*, serta menunjukkan dampak yang timbul bagi kepercayaan publik dan dinamika disinformasi. Rekomendasi studi lanjutan perlu memperdalam analisis terhadap pernyataan pejabat di media sosial dengan memperbanyak sumber informan lapangan guna memantau perubahan pola komunikasi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih telah menjadi versi terkuat dan tidak beristirahat sebelum semuanya usai. Kebanggaan ini adalah hasil dari peluhmu sendiri. Penulis berterima kasih pada orang tua yang telah memberi dukungan materil dan dukungan ilmu dari dosen pembimbing dalam pendampingan penyelesaian penulisan artikel.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ainur, L., & Uin, R. (2025). Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR: Analisis Etika Komunikasi Islam. *Journal of Islamic Communication Studies (JICoS)*, 3(1), 107–117. <https://doi.org/10.15642/jicos.2025.3.2.107-117>
- Aryanto Gabur, D. (2023). Etika Komunikasi di Era Digital dalam Fenomena Hate Speech Netizen Indonesia (Tinjauan dari Perspektif Etika Komunikasi Habermas). *Jurnal Poros Politik*. [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)
- Azzahra Salsabila, K., Anastasya, N., Saritza, Z., Simanjuntak, A. C., Nafis, M., Situmorang, K. R., Manurung, R., Annisa, S., & Info, A. (2025). *DPR Pada Era Presiden Prabowo (17+8 People's Demands: Crisis Of Trust And Reform In The Dpr During President Prabowo's Era)*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Betresia, A., Verdina, P., Welvyna, S., Miftahul Jannah, L., & Oktafia, E. (2021). *Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik Di Indonesia*.
- BOIM. (2025, September 1). *10 Kontroversi Anggota DPR, Menteri hingga Presiden yang Sebabkan Rakyat Murka Sumber Artikel berjudul " 10 Kontroversi Anggota DPR, Menteri hingga Presiden yang Sebabkan Rakyat Murka "*. Kabar Sleman. <https://sleman.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3049615304/10-kontroversi-anggota-dpr-menteri-hingga-presiden-yang-sebabkan-rakyat-murka?page=2>
- Dianira, F. (2025, September 4). *Ramai 17+8 Tuntutan Rakyat di Medsos, Ini Arti dan Isi Lengkapnya Baca artikel detikbali, "Ramai 17+8 Tuntutan Rakyat di Medsos, Ini Arti dan Isi Lengkapnya*. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/berita/d-8095817/ramai-17-8-tuntutan-rakyat-di-medsos-ini-arti-dan-isi-lengkapnya>
- Elyasa, D. M. (2023). Analisis Flexing Dan Hedonisme: Membentuk Citra Negatif Asn Di Media Sosial. *Jurnal Andradogi*, 11.
- Erina Naingolan, A., & Kartini. (2024). *Istilah Etika, Pengertian Etika Komunikasi, dan Etika Komunikasi Persuasif*.
- Fahrudin, A. (2021). Etika Komunikasi Pejabat Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *El Madani: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(02), 121–144. <https://doi.org/10.53678/elmadani.v2i02.290>
- Fairclough, N. (2020). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. 3rd Edition. *Routledge*.
- Fajri, R. (2025, May 11). *Langgar Kode Etik, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Ahmad Sahroni Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/827417/langgar-kode-etik-eko-patrio-nafa-urbach-dan-ahmad-sahroni-dinonaktifkan-sebagai-anggota-dpr>
- Fauzia Qonita, N. (2019). Dampak Pendidikan Tinggi Terhadap Etika Sopan Santun Di Kalangan Pejabat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(2).

- Haki, U., Danik Prahastiwi, E., & Hasibuan, N. S. (2024). Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan JURINOTEP*, 3(1), 2024–2025. <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v3i1>
- Herdinta, D. A. R., Zainudin, A., & Widodo, A. S. (2025). *Analisis Sentimen: Pengaruh Kampanye Media Sosial Pasangan Cagub Jawa Tengah dalam Mempengaruhi Pemilih Gen Z*. 10(1), 2025. <https://doi.org/10.14710/jiip.v10i1.25715>
- Iswenda, B. A. (2025, January 16). *Hati-Hati! Ribuan Konten Hoaks Teridentifikasi Sepanjang 2024*. GoodStats.
- J. Higley. (2010). *Elite Theory and Elites*. Springer, New York, NY.
- Jawad, M., Talreja, K., Bhutto, S. A., & Faizan, K. (2024). Investigating how AI Personalization Algorithms Influence Self-Perception, Group Identity, and Social Interactions Online. *Review of Applied Management and Social Sciences*, 7(4), 533–550. <https://doi.org/10.47067/ramss.v7i4.397>
- Jayakumar, S., Ang, B., & Dinayah Anwar, N. (2021). *Disinformation as a threat to national security. Disinformation and Fake News*.
- Kirana, D. (2025, August 19). *Menkeu Sri Mulyani Bantah Sebut Guru Beban Negara, Ini Isi Lengkap Pidatonya di ITB 7 Agustus*. Kompas TV.
- Medista, A. Z., & Marianata, A. (2024). *Generasi Z Dan Politik Viral: Analisis Semiotik Simbol “Joget Gemoy” Dalam Diskursus Kampanye Politik 2024*.
- Mito, S., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Pola Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 6(2). <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v6i2.137>
- Nurislamingsih, R., Sukaesih, S., & Komariah, N. (2021). Pengetahuan Lokal dan Perpustakaan: Analisis Tematik di Google Scholar. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 5(4). <https://doi.org/10.14710/anuva.5.4.543-554>
- Nurul Fadillah, M. (2023). *Nilai-Nilai Etika Komunikasi Menurut Al-Qur’an Dan Menjaga Komunikasi Antar Manusia Menurut Al-Qur’an*.
- Rizki, M. (2025, January 27). *Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke Parpol, DPR dan Polri Rendah*. KumparanNEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-ke-parpol-dpr-dan-polri-rendah-24NwZtPEjx9>
- Rukmini Widiaswari, R. (2022). Etika Administrasi Publik Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2). <https://doi.org/10.35931/aq.v16i2>
- Salomon A.M., & Babys, S. IP. ,M. S. (2020). *Filsafat Etika Komunikasi Pancasila (Sebuah Pendekatan Kepustakaan Terkait Etika komunikasi)*.
- Saputra, M. R. (2025a). Etika Publik dan Legitimasi Demokrasi Indonesia: Protes Tunjangan DPR, Konflik Elite, dan Respons Sipil. In *Journal of State Democracy (JSD)* (Vol. 1, Number 1).
- Saputra, M. R. (2025b). Public Ethics and the Legitimacy of Indonesian Democracy: Protests over DPR Allowances, Elite Conflict, and Civil Response Etika Publik dan Legitimasi Demokrasi Indonesia: Protes Tunjangan DPR, Konflik Elite, dan Respons Sipil. In *Journal of State Democracy (JSD)* (Vol. 1, Number 1).
- Sari, A. F. (2020). ETIKA KOMUNIKASI. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 127–135. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.152>
- Sarjito, A. (2021). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. In *Journal of Governance and Local Politics* (Vol. 5, Number 2).
- Sekar Arum, M., & Suryanto. (2025). *Analisis Wacana Kritis pada Ucapan Orang Tolol Sedunia Ahmad Sahroni dalam Dinamika Demonstrasi Publik*. <https://doi.org/10.64365/muradik.v1i4.63>
- Solosumantoro, H. (2025). *Etika Moral Jean-Jacques Rousseau dalam Ruang Perpolitikan di Indonesia*. <https://journal.iftkledalero.ac.id/index.php/JLOG>
- Suriadi, H. (2025). *Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital*. <https://jurnal.suriaacademicpress.com/index.php/jsers>

- Syauket, A., Indriasari, R., Budi Prayitno, R., Endrina Kartini Mendrofa, D., & Evelin Cabui, C. (2024). *Komunikasi Politik Pemerintahan*.
- Tarigan, E. P. (2025). Kekosongan Hukum Ai Di Indonesia: Kasus Deepfake Terhadap Sri Mulyani Dan Perbandingan Eu Ai Act. *JMA*, 3(11), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Teras Widy Rahayu, S. (2020). *Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa I* (Vol. 1, Number 1). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/interaksi>
- Van Dijk, T. A. (2014). *Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107775404>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Warsyim, Y. (2023). *Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia* (Vol. 9). <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>
- Wheeler, Mark. (2013). *Celebrity politics: image and identity in contemporary political communications*. Polity.
- Yonatan, A. Z. (2025, February 10). *Capai 360 Kasus, DPR & DPRD Jadi Profesi Ke-3 yang Paling Sering Korupsi*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/capai-360-kasus-dpr-dan-dprd-jadi-profesi-ke-3-yang-paling-sering-korupsi-kb9kh>